

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan adalah lima dari tiga puluh tujuh provinsi yang membentuk bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kelima provinsi tersebut terletak dalam satu pulau paling Timur Indonesia, yang disebut sebagai Tanah Papua. Papua dalam kajian studi hubungan internasional disebut sebagai Papua Barat karena istilah Papua dapat merujuk kepada seluruh Pulau Nugini, termasuk negara tetangga di belahan Timur, Papua Nugini (PNG) (diakses dari *website* Pemprov Papua). Papua Barat terletak pada 00,19' LS sampai 100,43' LS dan 1300 45' BT sampai 1500, 48 BT. Di bagian Barat terbentang pada 00,19' LS sampai 100,43' LS dan 1300 45' BT sampai 1500, 48 BT sampai 1410 BT dengan luas wilayah 644.981 km², terdiri dari daratan seluas 421.981 km².

Proses integrasi Papua ke dalam bingkai NKRI tidak terlepas dari berbagai persoalan dan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda di masa lalu. Aksi Belanda yang melancarkan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947 dan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948 dalam upaya merebut

kembali wilayah Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang membawa kobaran perang kemerdekaan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan kekalahan strategis dan politik bagi Belanda sehingga tergelarlah Konferensi Meja Bundar (KMB) (Mulyadi, Prakoso, Mudhio, 2021:1). Konferensi yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949 itu pada akhirnya menjadi tonggak diakuinya kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia atas Belanda melalui sebuah perjanjian (Taftazani, 2018). Namun, perjanjian tersebut pada akhirnya dibatalkan akibat ketidakpuasan Indonesia terhadap respon anggota PBB dan juga sikap Belanda yang kerap melanggar perjanjian.

Benih-benih separatisme Papua Barat sesungguhnya telah lama ditanam oleh Pemerintah Belanda bersamaan dengan pembentukan Dewan dan Komite Nasional Papua pada tahun 1961. Hal ini ditandai dengan munculnya kelompok gerakan separatis yang berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Kelompok yang memberi perlawanan ini kemudian oleh Pemerintah Indonesia disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kehadiran Pemerintah Indonesia di Papua ditandai sebagai babak pertama dari kekerasan politik di Papua, dan periode tahun 1962 sampai 1984 dapat dikatakan sebagai masa perang rahasia antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan OPM (Papua Road Map, 2010:11).

Penyelesaian konflik Indonesia-Belanda terkait isu Papua ini pada akhirnya melibatkan pembentukan Perjanjian New York / *New York Agreement* (NYA) pada tahun 1962 oleh PBB (Papua Road Map, 2010:3). Sesuai perjanjian

tersebut, Pemerintah Belanda kembali menyerahkan kedaulatan Irian Barat melalui suatu badan PBB – *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) kepada Republik Indonesia. Meski demikian, status Irian Barat akan benar-benar jelas setelah adanya jejak pendapat yang dalam klausul III *New York Agreement*, disebutkan harus selambat-lambatnya akhir tahun 1969 dan berada di bawah pengawasan PBB (Djopari, 1995:1).

Untuk memenuhi persyaratan dari NYA, Pemerintah Indonesia mengadakan PEPERA (Penentuan Suara Rakyat) pada tahun 1969 guna menentukan status politik masa depan Papua. Proses aktual yang digunakan dalam pemilihan ini adalah menggunakan musyawarah mufakat dengan sejumlah dewan daerah yang terdiri dari 1,024 perwakilan kepala daerah kelompok suku / etnis di Papua yang dipilih dan diarahkan sendiri oleh militer Indonesia dengan berada di bawah pengawasan PBB (Papua Road Map, 2010:3). Penentuan Pendapat Rakyat ini berakhir dengan hasil mayoritas pemilih memilih untuk berintegrasi dengan Indonesia.

Hasil PEPERA tersebut kemudian diterima oleh Majelis Umum PBB, dan pada 19 November 1969, Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari NKRI melalui resolusi 2504, yang menetapkan Provinsi Irian Jaya (Richard, 2011:1). Papua menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Rumbiak, 2015:36). Namun menurut McGibbon (2006), penerimaan hasil

model pemungutan suara yang dilakukan oleh Indonesia adalah model yang digunakan untuk menyelesaikan status politik Papua dalam konteks Perang Dingin antara Amerika Serikat / Barat dengan Uni Soviet / Timur.

Posisi Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada saat itu memang lebih dekat dengan negara-negara komunis (Timur) dan begitu anti terhadap Barat. Wardaya (2008:265) memandang faktor campur tangan Uni Soviet dengan memberikan bantuan militer kepada Indonesia dan kondisi politik nasional Indonesia dengan munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu partai pemenang Pemilu pada tahun 1955, serta kedekatan Presiden Soekarno dengan partai tersebut memaksa Amerika Serikat untuk melepaskan politik netralnya terhadap permasalahan Irian Barat dan mulai menekankan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat pada Indonesia (Riadhie, 2013). Belanda yang tidak dapat menyangkal tekanan Washington pun terpaksa mentranfer kekuasaan atas Papua kembali ke Indonesia (Singh, 2017:2).

Peralihan kekuasaan UNTEA menjadi Indonesia pada tahun 1969 dianggap tidak sesuai dengan harapan sebagian masyarakat Papua, terkhususnya kelompok OPM. Di samping itu, OPM juga menuntut ketimpangan politik, ekonomi dan tindakan pelanggaran HAM di Papua pasca bergabungnya Papua dengan Republik Indonesia. Berintegrasinya Papua ke dalam NKRI semakin mendorong kelompok OPM beserta beberapa masyarakat nasionalis Papua yang pro-kemerdekaan melakukan berbagai aksi protes dan perlawanan terhadap militer dan Pemerintah Indonesia.

Dalam perjuangannya, OPM bergerak secara militer dan politik. Perjuangan secara militer dilakukan dengan melakukan penyerangan kepada TNI dengan metode gerilya, di mana kelompok ini masih menggunakan senjata tradisional seperti tombak, busur, dan panah. Kegiatan militer OPM juga berada di bawah komando Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat (TPN-PB) yang dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern. TPN-PB dalam pergerakannya dibantu oleh *Papua Intelligence Service* (PIS), sebuah gerakan yang melakukan kegiatan-kegiatan rahasia seperti memata-matai para pendatang, kegiatan tentara dan pejabat setempat. Sedangkan perjuangan secara politik dilakukan dengan mencari perlindungan dan dukungan dari aktor hubungan internasional luar. Upaya ini juga disebut sebagai *political exile* (Sihaloho, Abbas, Anggraeni, 2021:7-8).

Kegiatan kelompok-kelompok OPM juga tidak hanya dilakukan dalam wilayah Papua saja melainkan juga di luar wilayah Indonesia, seperti wilayah Pasifik Selatan – terutama di Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua. OPM menggunakan konsep solidaritas persaudaraan Melanesia (*Melanesian brotherhood solidarity*), yang menghendaki agar negara-negara Pasifik Selatan yang berbagi kesamaan etnis untuk mendukung gerakan OPM secara bersama-sama (Richard, 2011:37). Rasa solidaritas yang tinggi ini juga mendorong munculnya perjuangan ras Melanesia untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dan tidak dijajah oleh ras lain atau yang dikenal dengan

Melanesian Way (Riyanto, 2021:5). Sebagai hasilnya, dukungan demi dukungan terus mengalir oleh masyarakat-masyarakat Pasifik Selatan.

Sekalipun memiliki politik luar negeri bebas-aktif, kiblat politik luar negeri Indonesia sebelumnya memang lebih cenderung kepada negara-negara Asia dan Barat saja, namun sejak tahun 2015, ketika negara-negara Pemerintah Indonesia mulai meletakkan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan di halaman utama politik luar negerinya. Hal ini tidak lepas dari kuatnya dukungan negara-negara di kawasan tersebut terhadap gerakan separatis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok OPM, yang tentu saja mengancam kedaulatan NKRI.

Secara formal, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan tetap mendukung keutuhan NKRI, kecuali Vanuatu dan Kepulauan Solomon, meskipun dukungan tersebut tidak bersifat permanen karena dinamika politik luar negeri yang dinamis. Keberpihakan keduanya dapat membawa isu Papua menjadi topik utama wacana di luar blok Melanesia seperti *Pacific Island Forum* (PIF) yang beranggotakan 18 negara Pasifik Selatan melalui pembentukan *Pacific Coalition on West Papua (PCWP)* (Yaung, dkk. 2020:109). Bagaimanapun, secara moral atau non formal, negara-negara di Pasifik Selatan lainnya seperti Papua Nugini dan Fiji juga turut mendukung gerakan separatis tersebut.

Berbagai kepentingan politik dari beberapa negara Pasifik Selatan disinyalir juga memberikan dukungan kepada para separatis Papua, seperti halnya Pemerintah dan Masyarakat Bougainville di Papua Nugini. Pada

Desember 2019, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Seby Sambom mengatakan Bougainville mendukung referendum Papua (Briantika, 2019). Dukungan terhadap separatisme Papua di Papua Nugini yang diberikan oleh Pemerintah Bougainville ini harus diantisipasi oleh Indonesia dikarenakan dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi kelompok nasionalis Papua (Yaung, dkk., 2020:106).

Pergolakan tensi konflik Papua kembali memanas pada tanggal 16-17 Agustus, ketika anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diduga melontarkan ujaran berbau rasisme terhadap sekelompok mahasiswa Papua yang berada di Asrama Mahasiswa Papua, di Surabaya lantaran mereka menemukan bendera Merah-Putih di halaman asrama tersebut tergelatak jatuh dalam selokan sekalipun belum mendapati kepastian siapa pelakunya. Peristiwa tersebut lantas menimbulkan kericuhan dan protes dari berbagai kalangan, terutama oleh masyarakat Papua itu sendiri. Bulan berikutnya, terjadi protes besar-besaran di Jayapura dan Wamena yang kemudian terus berlanjut hingga 23 September 2019.

Fenomena kericuhan yang terjadi saat itu semakin membangkitkan rasa solidaritas kekeluargaan negara-negara Pasifik Selatan terhadap Papua. Berbagai protes turut berlangsung di negara-negara Pasifik Selatan terkait kerusuhan yang terjadi di Papua. Pada tanggal 27 September 2019 Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmal sekali lagi mengangkat isu

Papua di atas meja sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, ia menyebutkan adanya pelanggaran HAM di tanah Papua oleh Indonesia dan juga mengecam tindakan tersebut (diakses dari *website detikNews*, 2019). Seruan serupa turut digaungkan oleh PM Kepulauan Solomon.

Dukungan internasional dan pengakuan atas negara merupakan salah satu fondasi dasar dalam hubungan diplomatik. Oleh sebab itu, dukungan dari negara asing atas integrasi wilayah NKRI akan menjadi indikator yang penting dalam penyelesaian isu Papua secara internasional. Belum lagi, status Indonesia sebagai kekuatan menengah di kawasan Indo-Pasifik mengharuskan Indonesia untuk terus meningkatkan *soft power*-nya di kawasan ini demi memulihkan citra dan wajah Indonesia yang digambarkan begitu negatif oleh para kelompok separatis OPM. Pada akhirnya, kepentingan nasional suatu negara tidak bisa dilepaskan dari isu kedaulatan. Kepentingan nasional Indonesia dalam hal ini adalah untuk memanfaatkan keniscayaan perannya di tengah kecenderungan eksklusivitas dengan ciri *zero-sum game* dari negara-negara besar khususnya AS dan Tiongkok (Jemadu, hal. 2)

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla meluncurkan suatu program bernama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia (LDKPI) atau *Indonesian Agency for International Development* (Indo AID). Pembentukan tersebut tepat diakhir kepemimpinan Presiden Jokowi di periode pertama dan tepat dua bulan setelah kericuhan

Papua di Indonesia pada tahun 2019. Indo AID memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana kerja sama pembangunan internasional (*endowment fund*) serta menyalurkan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sebagai salah satu bentuk perwujudan diplomasi tangan di atas. Program Indo AID ini sendiri merupakan sebuah sinergitas antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia.

Sejak dibentuknya Indo AID pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah berhasil memberikan dukungan kerja sama pembangunan dengan dua belas negara senilai 18 juta USD. Adapun 92% kerjasama diantaranya dilakukan dengan negara-negara Pasifik (Utami, 2021). Berdasarkan pernyataan Direktur Umum lembaga dana kerjasama tersebut, Pasifik Selatan merupakan salah satu kawasan prioritas mereka. Sejauh ini, Indo AID telah berhasil melakukan kerja sama dengan tiga negara di Pasifik Selatan, yakni Fiji, Kepulauan Solomon dan juga Papua Nugini. Di mana pada tahun sejak tahun 2020-2022, Indo AID setidaknya telah berhasil menyalurkan bantuan kepada ketiga negara tersebut senilai Rp 148,8 M. Dana tersebut merupakan bantuan kemanusiaan maupun *capacity building* yang digunakan untuk pembangunan daerah di Fiji dan Kepulauan Solomon pasca negara tersebut diterjang oleh badai siklon, serta dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Fiji, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini.

Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan rentan menghadapi bencana alam seperti badai topan, gempa bumi, gunung meletus hingga tsunami. Hal ini diakibatkan karena letak kawasan tersebut yang terletak di kawasan cincin api (*ring of fire*) dan juga ancaman perubahan iklim yang belakangan semakin menjadi permasalahan serius di kawasan ini. Permasalahan-permasalahan ini sering memberi dampak yang merugikan keberlangsungan hidup dan perekonomian masyarakat di kawasan Pasifik Selatan. Belum lagi, adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga hari ini semakin memperparah perekonomian di kawasan tersebut.

Bagaimanapun, penyaluran bantuan dana Indo AID juga tidak serta merta tanpa tujuan tertentu. Setidaknya terdapat beberapa motif yang menggerakkan Indonesia dalam mencapai kepentingan dibalik pendekatan *soft power*-nya. Hal ini sesuai dengan konsep motif bantuan luar negeri yang dikemukakan oleh Maria Andersson pada tahun 2009 di mana pemberian bantuan kemanusiaan (*humanitarian motives*) untuk penanganan Covid-19 di Fiji, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini selaras dengan motif ekonomi (*economic motives*). Dimana pada akhirnya, hal-hal juga dilakukan untuk mempertegas identitas Indonesia sebagai bagian dari Keluarga Melanesia yang juga memiliki otoritas terhadap wilayah Papua (*Identity Motives*) di kawasan Pasifik Selatan.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis sebuah penelitian yang diberi judul **“Upaya Indonesia Meredam Dukungan**

Kawasan Pasifik Selatan Terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) Melalui *Indonesian Agency for International Development (Indo AID)*".

Judul penelitian ini didukung dengan beberapa mata kuliah yang sudah pernah dipelajari selama perkuliahan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya ialah: Pengantar Hubungan Internasional, Diplomasi dan Negosiasi, Regionalisme, Organisasi Internasional, Hubungan Internasional di Australia dan Pasifik, dan Dinamika Politik Internasional.

Dalam penyusunan tulisan ini, peneliti sedikit banyak terinspirasi dan mereferensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada tulisan ini. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti, namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rezya Agnesica Helena Sihaloho, Rusdi Jarwo Abbas, Silvia Dian Anggraeni dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Pertamina pada tahun 2022 dengan judul "Strategi Manuver Geoekonomi Indonesia dalam Merespons Dukungan Negara-Negara Pasifik Selatan Atas Isu Kemerdekaan Papua". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perspektif geoekonomi dengan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan studi pustaka dan berbagai sumber yang kredibel serta relevan

dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kapabilitas terkait isu pembahasan. Hasil temuan dari penelitian ini menemukan bahwa dukungan-dukungan yang diberikan oleh beberapa negara-negara Pasifik Selatan menjadi perhatian penting bagi Indonesia karena berkaitan dengan citra Indonesia di dunia internasional. Penyelesaian internasionalisasi Papua hanya dapat diselesaikan dengan penyelesaian masalah secara domestik terlebih dahulu. Peneliti merangkum tiga saran yang dapat dilakukan agar dapat meminimalisasi atau menghentikan isu internasionalisasi.

Kedua, penelitian oleh Maria Indira Aryani dan Renitha Dwi Hapsari dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada tahun 2021 yang berjudul "*Foreign Aid for Alliance: Indonesia's Effort to Find Support in the South Pacific Region*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan studi kepustakaan berupa buku, artikel jurnal dan artikel berita. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa bantuan luar negeri hampir selalu mengandung motif kepentingan politik di dalamnya. Dalam hal ini, bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia kepada kawasan Pasifik Selatan bertujuan untuk menjaga hubungan dan dukungan kawasan Pasifik Selatan terhadap kedaulatan Indonesia.

Ketiga, penelitian oleh Bima Bramasta dan Praja Firdaus Nuryananda dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional

Veteran Jawa Timur pada tahun 2021 yang berjudul “Strategi Pemerintah Indonesia Meredam Isu Papua: Analisis Bantuan Luar Negeri Indonesia ketiga Negara Pasifik Selatan (Fiji, Kep. Solomon, dan Vanuatu) Tahun 2015 – 2019”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan berupa jurnal akademisi, media, serta data resmi pemerintah yang mencakup buku dan laporan tahunan resmi dari pemerintah. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meredam kritikan mengenai isu Papua sesuai dengan konsep yang digagas oleh Maria Andersson yakni konsep *Aid Allocation Motives* yang dilakukan oleh Indonesia terbagi sesuai indikator yang dipaparkan oleh Maria Andersson (2009), yakni: (1) *Humanitarian Motives*; (2) *Economic Motives*; (3) *Identity Motives*.

Studi sebelumnya tidak pernah membahas secara menyeluruh terkait implementasi program Indo AID di kawasan Pasifik Selatan. Penelitian yang akan diangkat oleh peneliti ini akan membahas mengenai upaya implementasi dari *Indonesian Agency for International Development* (Indo AID) terhadap beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan pada tahun 2019 – 2022 dalam upaya meredam dukungan kawasan tersebut terhadap gerakan separatisme Papua.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah Mayor

Rumusan masalah dilakukan guna memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan penelitian yang mengacu pada latar belakang. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah mayor dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana upaya Indonesia meredam dukungan kawasan Pasifik Selatan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui *Indonesian Agency for International Development (Indo AID)*?”**

1.2.2. Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan rumusan masalah mayor di atas, peneliti kemudian menurunkan ke dalam beberapa rumusan masalah minor, diantaranya:

1. Bagaimana peluncuran Indo AID di Pasifik Selatan?
2. Apakah terdapat kendala atau tantangan dalam peluncuran bantuan Indo AID?
3. Bagaimana dukungan kawasan Pasifik Selatan terhadap OPM pasca peluncuran bantuan Indo AID?
4. Bagaimana prospek ke depan dari peluncuran bantuan Indo AID di kawasan Pasifik Selatan?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu jauh, melebar, serta luas dalam pembahasannya, maka dari itu, peneliti telah memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini hanya akan berfokus kepada negara-negara Pasifik Selatan, khususnya implementasi Indo AID di tiga negara Pasifik Selatan; Fiji, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Peneliti memilih kawasan Pasifik Selatan sebab kawasan merupakan kawasan yang kerap menginternasionalisasi isu Papua dalam forum-forum internasional. Selain itu, kawasan tersebut juga merupakan salah satu markas dari kelompok-kelompok OPM yang kerap berupaya untuk memperburuk citra Indonesia terhadap persepsi publik internasional.

Dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti juga membatasi rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2022. Pembatasan tahun tersebut diambil sebab pada tahun 2019, eskalasi konflik Papua kembali meningkat dengan terjadinya kerusuhan akibat adanya tindakan persekusi dan dugaan ujaran rasisme yang dilakukan oleh anggota bersenjata Republik Indonesia di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Peristiwa tersebut kemudian menyebabkan semakin vokalnya dukungan negara-negara Pasifik Selatan terhadap perjuangan kemerdekaan Papua. Pada tahun yang sama, Pemerintah Indonesia juga membentuk Lembaga Dana Kerjasama

Pembangunan (LDKPI) / *Indonesia Agency for International Development* (Indo AID).

Penelitian ini berlanjut pada tahun 2020 yang di mana merupakan masa munculnya pandemi *Coronavirus Disease 19* (Covid-19). Kehadiran pandemi ini mengakibatkan kolapsnya perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali di kawasan Pasifik Selatan. Hal ini diakibatkan oleh tingginya tingkat ketergantungan negara-negara di kawasan tersebut terhadap sektor pariwisata dan juga bantuan luar negeri. Penelitian ini berakhir pada bulan Maret tahun 2022. Masa tersebut dipilih sebab peneliti ingin meninjau dan menganalisis perkembangan, kendala dan prospek dari upaya Indonesia meredam dukungan Pasifik Selatan terhadap OPM melalui program Indo AID pasca diimplementasikan di Kepulauan Solomon dan terkhususnya Papua Nugini yang pertama kali diimplementasikan pada tahun 2021.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui upaya *soft power* Indonesia di kawasan Pasifik Selatan, serta menganalisis dan mendeskripsikan keefektivitasan program tersebut dalam meredam dukungan kawasan Pasifik Selatan terhadap OPM melalui implementasi Indo AID.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai upaya menjawab tantangan Indonesia dalam menyikapi dukungan kawasan Pasifik Selatan terhadap gerakan separatis Papua merdeka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai upaya *soft power* Indonesia melalui implementasi Indo AID dalam upaya meredam dukungan kawasan Pasifik Selatan terhadap gerakan separatis Papua.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peluncuran bantuan Indo AID di kawasan Pasifik Selatan.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala-kendala apa saja yang ditemukan dari peluncuran bantuan Indo AID di kawasan Pasifik Selatan.
- c. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan prospek ke depan dari peluncuran bantuan Indo AID di kawasan Pasifik Selatan.

- d. Untuk mengetahui dukungan kawasan Pasifik Selatan terhadap OPM pasca peluncuran bantuan Indo AID.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi keterlibatan seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam turut serta menjalankan *soft power* untuk memperbaiki citra negatif Indonesia terkait krisis kemanusiaan di tanah Papua. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi *soft power* Indonesia di kawasan Pasifik Selatan terkait isu separatisme di tanah Papua.

Penelitian ini dianggap penting karena akan meneliti tentang upaya *soft power* Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dalam upaya membela kedaulatannya atas Papua di masa-masa yang penuh dengan tantangan dan tekanan global. Berbagai permasalahan seperti dinilai dapat merusak citra Indonesia. Oleh sebab itu, pendekatan *soft power* harus menjadi prioritas bagi Indonesia di masa sekarang dalam upaya meredam dukungan global, dimulai

dari negara-negara tetangga seperti di kawasan Pasifik Selatan terhadap aktivitas separatis di Papua.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan literasi melalui metode penelitian kualitatif terkhususnya terkait upaya *soft power* Indonesia di kawasan Pasifik Selatan melalui program Indo AID.

b. Bagi Pendidik

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang strategi *soft power* di suatu negara atau kawasan khususnya melalui metode penelitian dan memberikan konstruksi berpikir yang metodis atas isu-isu internasional yang terjadi.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan / pertimbangan dalam melakukan strategi *soft power* di kawasan Pasifik Selatan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman dan wawasan tentang permasalahan politik internasional baik dari sudut

pandang Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan terkait konflik separatisme Papua.